



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG KECAMATAN BANDARKEKEDUNG MULO

Jln. Raya Banjarsari No. 01
BANDARKEKEDUNG MULO

KEPUTUSAN CAMAT BANDARKEKEDUNG MULO
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/ 12 /415.57/2023

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANDARKEKEDUNG MULO
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023

CAMAT BANDARKEKEDUNG MULO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bandarkedungmulo Kabupaten Jombang, perlu disusun Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandarkedungmulo;
- b. bahwa Review Rencana Strategi Kecamatan Bandarkedungmulo Kabupaten Jombang Tahun 2018 - 2023 menyesuaikan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b pertimbangan menimbang ini, maka perlu menetapkan Review Rencana Strategis Kecamatan Bandarkedungmulo Kabupaten Jombang tahun 2018 - 2023 dengan Keputusan Camat Bandarkedungmulo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 272-7/2016);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E)
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 45/D);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2021 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Review Rencana Strategis Kecamatan Bandarkedungmulyo Tahun 2018 – 2023.
- KEDUA : Review Rencana Strategis Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2023 adalah dokumen perencanaan periode 5 tahun yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang setiap tahun selama periode Renstra berjalan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 20 Januari 2023
CAMAT BANDARKEDUNG MULYO,



HARIYANTO

BERITA ACARA
HASIL REVIU SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023
KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO KABUPATEN JOMBANG

Pada hari ini, Jum'at tanggal 6 bulan Januari tahun 2023, kami Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat Bandarkedungmulyo Nomor: 188/07/415.57/2023 tanggal 4 Januari 2023, telah melaksanakan Reviu Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, dengan rincian hasil sebagai berikut :

I. TUJUAN

a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

TUJUAN
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan publik

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Tujuan

<p>Tujuan "Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan publik" perlu diubah menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik <p>Tujuan diubah berdasarkan arahan Bappeda tanggal 4 Januari 2022 dilatarbelakangi ketidaksinkronan antara tujuan OPD dan sasaran OPD pada Program Rutin, tujuan PD pada Program Rutin setiap Perangkat Daerah berbeda-beda, dan tujuan OPD diselaraskan dengan sasaran RPJMD dan tujuan OPD dapat menunjang tercapainya sasaran RPJMD, dimana sasaran RPJMD adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
--

c. Uraian Tujuan Sesudah Reviu

<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

II. INDIKATOR TUJUAN

a. Uraian Indikator Tujuan, Formulasi Sebelum Reviu

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI INDIKATOR TUJUAN
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun n
	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik tahun n

b. Rekomendasi Tim Reviu Perubahan Indikator Tujuan, Formulasi Tujuan

SEBELUM REVIU				REKOMENDASI TIM REVIU	SESUDAH REVIU			
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI INDIKATOR TUJUAN		NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI INDIKATOR TUJUAN
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun n	Tidak terdapat perubahan indikator tujuan, tujuan telah sesuai dengan Perubahan Renstra 2018-2023 dan Perubahan RPJMD. Indikator tujuan OPD menunjang capaian indikator sasaran (IKD)	1.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun n
		Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik tahun n		2.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik tahun n

III.SASARAN

a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

SASARAN
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Kecamatan

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Sasaran

<p>Sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Kecamatan” perlu diubah menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan <p>Sasaran diubah berdasarkan arahan Bappeda tanggal 4 Januari 2023 dilatarbelakangi Ketidaksinkronan antara tujuan PD dan sasaran PD pada Program Rutin, Sasaran PD pada Program Rutin setiap Perangkat Daerah berbeda-beda, dan sasaran OPD harus selaras dan dapat menunjang tercapainya tujuan OPD.</p>
--

1. Uraian Sasaran Sesudah Reviu

<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan
--

IV. INDIKATOR SASARAN

a. Uraian Indikator Sasaran, Formulasi Sebelum reviu

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP tahun n
	IKM Kecamatan	IKM Kecamatan
	IPP Kecamatan	IPP Kecamatan
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	<p>Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi</p>

		terkait
	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	<p>Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes</p>
	Persentase evaluasi RAPERDES APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu	<p>Jumlah evaluasi Raperdes APBDes / Perubahan APBDes tepat waktu</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah evaluasi Raperdes APBDes / Perubahan APBDes</p>

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Indikator Sasaran

SEBELUM REVIU				REKOMENDASI TIM REVIU	SESUDAH REVIU			
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR SASARAN		NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Bandarkedungmulyo	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Bandarkedungmulyo tahun n	Tidak ada perubahan indikator sasaran, sasaran telah sesuai dengan Perubahan Renstra tahun 2018-2023 dan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023	1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Bandarkedungmulyo	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Bandarkedungmulyo tahun n
		IKM Kecamatan Bandarkedungmulyo	IKM Kecamatan Bandarkedungmulyo tahun n		2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Bandarkedungmulyo	IKM Kecamatan Bandarkedungmulyo tahun n
		IPP Kecamatan Bandarkedungmulyo	IPP Kecamatan Bandarkedungmulyo tahun n		IPP Kecamatan Bandarkedungmulyo		IPP Kecamatan Bandarkedungmulyo tahun n	
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait ----- x 100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait		Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait ----- x 100% Jumlah laporan kasus pelanggaran	

			Trantibum					Perda/Perkada dan Trantibum
								<p>Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu</p> <p>Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu ----- x 100%</p> <p>Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes</p>
								<p>Persentase evaluasi RAPERDES APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu</p> <p>Jumlah evaluasi Raperdes APBDes / Perubahan APBDes tepat waktu ----- x 100%</p> <p>Jumlah evaluasi Raperdes APBDes / Perubahan APBDes</p>
								<p>Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu</p> <p>Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu ----- x 100%</p> <p>Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes</p>
								<p>Persentase evaluasi RAPERDES APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu</p> <p>Jumlah evaluasi Raperdes APBDes / Perubahan APBDes tepat waktu ----- x 100%</p> <p>Jumlah evaluasi Raperdes APBDes / Perubahan APBDes</p>

V. PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM

a. Uraian Program Sebelum Reviu

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Kecamatan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Program

SEBELUM REVIU			REKOMENDASI TIM REVIU	NO	SESUDAH REVIU	
NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			SASARAN STRATEGIS	PROGRAM
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Kecamatan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada perubahan program, program telah sesuai dengan Perubahan Renstra tahun 2018-2023 dan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 serta sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah	1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
		Program koordinasi				Program

		ketentraman dan ketertiban umum				koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
--	--	---------------------------------	--	--	--	--

VI. INDIKATOR PROGRAM

a. Uraian Indikator Program dan formulasi Sebelum Reviu

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Jumlah capaian kinerja seluruh pns Kec. Bandarkedungmulyo -----x100 jumlah pegawai Kec. Bandarkedungmulyo
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	Jumlah pelaksanaan kegiatan PHBN/PHBA -----x100 Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang direncanakan
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti -----x100 Jumlah rekomendasi Forkopimcam
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai PATEN Kecamatan	Nilai PATEN Kecamatan tahun n
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	Jumlah Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi -----x100 Jumlah Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif -----x100 Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDesa	Jumlah desa yang melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDesa -----x100 Jumlah Desa

	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti -----x100 Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait -----x100 Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Indikator Program dan Formulasi Program

SEBELUM REVIU				REKOMENDASI TIM REVIU	NO	SESUDAH REVIU		
NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR PROGRAM
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Jumlah capaian kinerja seluruh pns Kec. Bandarkedungmulyo -----x100 jumlah pegawai Kec. Bandarkedungmulyo	Tidak ada perubahan indikator program, indikator sudah sesuai dengan Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023	1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Jumlah capaian kinerja seluruh pns Kec. Bandarkedungmulyo -----x100 jumlah pegawai Kec. Bandarkedungmulyo
2.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	Jumlah pelaksanaan kegiatan PHBN/PHBA -----x100 Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang direncanakan		2.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	Jumlah pelaksanaan kegiatan PHBN/PHBA -----x100 Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang direncanakan
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti -----x100 Jumlah rekomendasi Forkopimcam				Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti -----x100 Jumlah rekomendasi Forkopimcam
3.	Program penyelenggaraan	Nilai PATEN Kecamatan	Nilai PATEN Kecamatan tahun n	3.	Program penyelenggaraan	Nilai PATEN Kecamatan	Nilai PATEN Kecamatan tahun n	

	pemerintahan dan pelayanan publik					pemerintahan dan pelayanan publik		
4.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	Jumlah Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi -----x100 Jumlah Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa		4.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	Jumlah Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi -----x100 Jumlah Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun n				Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun n
5.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDesa	Jumlah desa yang melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDesa -----x100 Jumlah Desa		5.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDesa	Jumlah desa yang melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDesa -----x100 Jumlah Desa
		Persentase Rekomendasi Hasil	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan				Persentase Rekomendasi Hasil	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan

		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti -----x100 Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa			Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti -----x100 Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa
6.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait -----x100 Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum		6.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait -----x100 Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum

VII. KEGIATAN

a. Uraian Kegiatan Sebelum Reviu

PROGRAM	KEGIATAN
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Kegiatan

NO	SEBELUM REVIU		REKOMENDASI TIM REVIU	NO	SESUDAH REVIU	
	PROGRAM	KEGIATAN			PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tidak ada perubahan kegiatan, kegiatan telah sesuai dengan Perubahan Renstra tahun 2018-2023 dan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 serta sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan	1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		2.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
3.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		3.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
4.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		4.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
5.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		5.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		6.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
----	--	---	--	----	--	---

VIII. INDIKATOR KEGIATAN

a. Uraian Indikator Kegiatan dan Formulasi Sebelum Reviu

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100 Pencairan gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran -----x100 Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana -----x100

		Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100 Jumlah barang milik daerah yang dipelihara
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA tahun n
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam tahun n
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Jumlah pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar -----x100 Jumlah pelayanan terpadu (PATEN)
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu tahun n
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n
Fasilitasi, Rekomendasi dan	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum tahun n

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Indikator Kegiatan dan Formulasi Indikator Kegiatan

NO	SEBELUM REVIU			REKOMENDASI TIM REVIU	NO	SESUDAH REVIU		
	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan	Tidak ada perubahan indikator kegiatan, indikator kegiatan telah sesuai dengan Perubahan Renstra tahun 2018-2023 dan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023	1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan

2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100 Pencairan gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100 Pencairan gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan				Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran -----x100 Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan		3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran -----x100 Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase realisasi pengadaan	Jumlah realisasi pengadaan		4.	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase realisasi pengadaan	Jumlah realisasi pengadaan

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sarana dan prasarana aparatur	sarana dan prasarana -----x100 Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sarana dan prasarana aparatur	sarana dan prasarana -----x100 Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan
5.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan		5.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100 Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100 Jumlah barang milik daerah yang dipelihara
7.	Penyelenggaraan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan		7.	Penyelenggaraan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan

	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan PHBN/PHBA	Pelaksanaan PHBN/PHBA tahun n		Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan PHBN/PHBA	Pelaksanaan PHBN/PHBA tahun n
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam tahun n			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam tahun n
8.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar}}{\text{Jumlah pelayanan terpadu (PATEN)}} \times 100$	8.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar}}{\text{Jumlah pelayanan terpadu (PATEN)}} \times 100$
9.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu tahun n	9.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu tahun n

		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n	10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n
11	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum tahun n	11	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum tahun n

IX. INDIKATOR SUB KEGIATAN

a. Uraian Indikator Sub Kegiatan Sebelum Reviu

SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Bandarkedungmulyo yang di fasilitasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak Jumlah pemenuhan barang penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Pengadaan sarana Gedung Kantor
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang

perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	dipelihara
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Bandarkedungmulyo yang dipelihara
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam
Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi
	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa
	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan
	Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Indikator dan Formulasi Sub Kegiatan

NO	SEBELUM REVIU			REKOMENDASI TIM REVIU	NO	SESUDAH REVIU		
	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN			SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n	Tidak ada perubahan sub kegiatandan indikatornya. Sub kegiatan dan indikatornya telah sesuai dengan Perubahan Renstra tahun 2018-2023 dan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 serta sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi,	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Bandarkedungmulyo yang di fasilitasi	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Bandarkedungmulyo yang di fasilitasi		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Bandarkedungmulyo yang di fasilitasi	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Bandarkedungmulyo yang di fasilitasi
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD tahun n		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD tahun n
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

			tahun n	Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah				tahun n
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi tahun n		6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi tahun n
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi tahun n		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi tahun n
8	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi tahun n		8	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi tahun n
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	Jumlah pemenuhan barang cetak tahun n		9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	Jumlah pemenuhan barang cetak tahun n
		Jumlah pemenuhan barang penggandaan	Jumlah pemenuhan barang penggandaan tahun n				Jumlah pemenuhan barang penggandaan	Jumlah pemenuhan barang penggandaan tahun n
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan tahun n		10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan tahun n
11	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan		11	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan

	skpd	konsultasi SKPD	konsultasi SKPD tahun n			skpd	konsultasi SKPD	konsultasi SKPD tahun n
12	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tahun n		12	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tahun n
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Pengadaan sarana Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan sarana Gedung Kantor tahun n		13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Pengadaan sarana Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan sarana Gedung Kantor tahun n
14	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi tahun n		14	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi tahun n
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat tahun n		15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat tahun n
16	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi tahun n		16	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi tahun n
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum tahun n		17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum tahun n
18	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan		18	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan

	pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	yang dipelihara	yang dipelihara tahun n		pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	yang dipelihara	yang dipelihara tahun n
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya tahun n			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya tahun n
19	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Bandarkedung mulyo yang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Bandarkedung mulyo yang		19	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Bandarkedung mulyo yang
20	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara tahun n		20	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara
21	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan tahun n		21	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan
22	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam		22	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam

			tahun n				tahun n
23	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	Jumlah pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi -----x100 Jumlah pengajuan pelayanan Adminduk		23	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi -----x100 Jumlah pengajuan pelayanan Adminduk
		Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	Jumlah pengajuan perizinan yang diverifikasi -----x100 Jumlah pengajuan perizinan				Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi ----- ----x100 Jumlah pengajuan perizinan
24	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa tahun n		24	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa tahun n
		Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan tahun n				Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan tahun n
		Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan tahun n				Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan tahun n
25	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB		25	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB

		Desa	Desa tahun n			Desa	Desa tahun n
26	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan tahun n		26	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan tahun n

Demikian Hasil Reviu Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) oleh Tim Penerapan SAKIP Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan selanjutnya.

Komentar Pejabat:

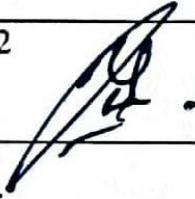
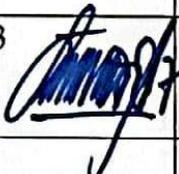
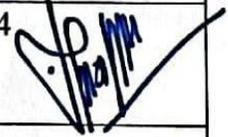
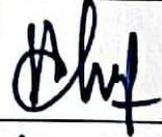
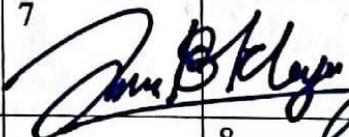
Berdasarkan hasil reviu dari Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bandarkedungmulyo akan dilaksanakan reviu terhadap tujuan, sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandarkedungmulyo. Reviu didasarkan pada:

1. Perubahan RPJMD Kab. Jombang dan Peruhan Renstra Kecamatan Bandarkedungmulyo Tahun 2018-2023 yang disesuaikan dengan **Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.**
2. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan harus sesuai dengan **Perbup No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Perbup No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.**
3. Penetapan Indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan harus mampu menunjang kinerja atasan secara linear dari staf- eselon III (button up).
4. Penetapan indikator tujuan dan sasaran OPD harus selaras dan menunjang tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD yang apabila ditarik keatas mendukung tercapainya visi – misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
5. Penetapan Indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan harus orientasi hasil (outcome)
6. Penetapan Indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan harus memenuhi kriteria SMART

Ranggalu, 16 Januari 2023
CAMAT BANDARKEDUNG MULYO

HARIYANTO, S.Sos., M.Si
NIP. 196809251990031003

**TIM PENERAPAN SAKIP KECAMATAN
BANDARKEDUNG MULYO TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	HARIYANTO, S.Sos., M.Si	Camat	1 	
2	PRASETYO WIDODO, SH.,M.Si	Ketua Tim		2 
3	THOKIT HARIANTO, SE	Anggota	3 	
4	MAMI SETIANINGSIH, SH	Anggota		4 
5	SYAIFUDIN	Anggota	5 	
6	SODIKIN, SE	Anggota		6 
7	MOKHAMMAD DONI BAKHTIYAR, SE	Anggota	7 	
8	SUWARNO, SH	Anggota		8 